

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN IMPLEMENTASI SAK-ETAP DALAM PELAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DESA CIBUNTU

Ahmad Sholeh Mashudi¹, Muzayyanah², Itat Tatmimah³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhamadiyah Cirebon, Indonesia

Email: ahmad.sholeh.mashudi@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dalam pelaporan keuangan di BUMDes Desa Cibuntu. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPI yang diterapkan belum berjalan optimal terutama pada aspek kebijakan tertulis dan pemantauan aktivitas keuangan. Implementasi SAK-ETAP juga belum sepenuhnya sesuai standar, terutama terkait dengan ketiadaan catatan atas laporan keuangan dan kurangnya pelatihan bagi sumber daya manusia. Faktor penghambat utama adalah keterbatasan kompetensi SDM dan infrastruktur teknologi, meskipun terdapat komitmen kuat dari pengelola dan pemerintah desa. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan, penyusunan kebijakan internal, serta digitalisasi pencatatan keuangan sebagai upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan BUMDes. Temuan ini juga menguatkan teori keagenan dan kerangka COSO dalam konteks pengelolaan keuangan entitas desa.

Kata kunci: Sistem Pengendalian Internal, SAK-ETAP, Pelaporan Keuangan BUMDES

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Internal Control System (ICS) and the application of Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability (SAK-ETAP) in the financial reporting of the Village-Owned Enterprise (BUMDes) in Cibuntu Village. A qualitative research approach was employed, with data collected through interviews, observations, and document analysis. The findings reveal that the ICS has not been fully effective, particularly in the areas of written policies and monitoring of financial activities. The application of SAK-ETAP is also not yet optimal, especially regarding the absence of notes to the financial statements and the lack of technical training for human resources. Key challenges include limited human resource competence and inadequate technological infrastructure, although strong commitment from the village government and BUMDes management exists. The study recommends capacity-building through training, the establishment of internal financial policies, and digitalization of financial recording to improve accountability and transparency in BUMDes financial reporting. These findings also reinforce agency theory and the COSO framework within the context of village financial management.

Keywords: Internal Control System, SAK-ETAP, BUMDes Financial Reporting

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga ekonomi desa yang dibentuk untuk mengelola potensi dan aset desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2021, BUMDes memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai standar. Dalam praktiknya, penguatan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas

Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) merupakan dua aspek fundamental dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang baik.

Fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa banyak BUMDes di Indonesia belum mampu mengimplementasikan SPI dan SAK-ETAP secara optimal. Berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2023, hanya sekitar 27,4% dari total BUMDes aktif yang mampu menyusun laporan keuangan tahunan secara akurat dan tepat waktu, serta sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Salah satu penyebab utama rendahnya kualitas pelaporan keuangan adalah lemahnya sistem pengendalian internal serta rendahnya pemahaman pengelola BUMDes terhadap SAK-ETAP (Kemendesa PDTT, 2023).

Studi oleh Prabowo & Kurniawan (2021) menyebutkan bahwa lemahnya kontrol internal dalam pengelolaan keuangan BUMDes berdampak langsung terhadap penyimpangan anggaran dan ketidaksesuaian laporan keuangan dengan aktivitas operasional. Selain itu, penelitian Atmadja et al. (2023) menunjukkan bahwa kurangnya kapasitas SDM menjadi hambatan utama dalam penerapan prinsip akuntansi berbasis entitas kecil-menengah. Sementara itu, Ida Ayu & Atmadja (2023) menyoroti kurangnya pelatihan dan monitoring dari pemerintah daerah sebagai penyebab lemahnya akuntabilitas pengelolaan BUMDes. Studi lainnya oleh Sulistyowati et al. (2024) juga menegaskan bahwa penerapan SPI berbasis kerangka COSO lima komponen (lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan) dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan entitas desa. Namun, hal ini masih jarang diterapkan secara konsisten di tingkat desa karena kendala literasi akuntansi, infrastruktur, dan teknologi informasi.

Fenomena ini juga terjadi pada BUMDes Teja Pundi Kencana Desa Cibuntu, Kabupaten Kuningan, yang merupakan salah satu BUMDes aktif dan berkembang di Jawa Barat. BUMDes ini mengelola beberapa unit usaha pariwisata berbasis desa, seperti penginapan, wahana alam, dan produk UMKM. Berdasarkan hasil observasi awal dan laporan internal tahun 2023, BUMDes Cibuntu mencatat total pendapatan usaha sebesar Rp 428.000.000 dengan laba bersih sebesar Rp 74.000.000. Namun, pelaporan keuangan yang dihasilkan belum sepenuhnya mengikuti struktur SAK-ETAP, serta masih terdapat kelemahan dalam dokumentasi transaksi, pemisahan fungsi pengawasan, dan prosedur pencatatan aset tetap. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun secara operasional cukup berkembang, BUMDes ini masih menghadapi tantangan dalam implementasi SPI dan pelaporan keuangan yang sesuai standar.

Berdasarkan fenomena dan kajian literatur tersebut, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah belum optimalnya implementasi Sistem Pengendalian Internal dan penerapan SAK-ETAP dalam penyusunan laporan keuangan BUMDes Cibuntu. Ketidakterpaduan antara praktik akuntansi dan standar yang berlaku berisiko menurunkan kualitas informasi keuangan yang disampaikan kepada pemangku kepentingan, serta melemahkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa dan novelty dari penelitian ini terletak pada fokus kontekstual terhadap implementasi SPI dan SAK-ETAP pada entitas BUMDes berbasis pariwisata di desa wisata, yang hingga saat ini masih jarang dikaji secara spesifik dengan menggali praktik

pengendalian internal dan pelaporan keuangan secara riil di lapangan. Penelitian ini juga mengintegrasikan kerangka COSO dan *agency theory* untuk menjelaskan hubungan antara sistem kontrol dan pelaporan keuangan dalam konteks desa, yang belum banyak dieksplorasi secara komprehensif dalam literatur akuntansi publik desa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi sistem pengendalian internal dan SAK-ETAP dalam pelaporan keuangan pada BUMDes Teja Pundi Kencana Desa Cibuntu, mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan pelaporan keuangan yang sesuai standar. Penelitian dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan literatur tentang tata kelola keuangan desa berbasis SPI dan SAK-ETAP, serta kontribusi praktis bagi pemerintah desa dan pengelola BUMDes dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Dengan pendekatan berbasis teori COSO dan teori keagenan (*agency theory*), artikel ini juga bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang hubungan antara mekanisme kontrol dan kualitas laporan keuangan dalam entitas publik non-akuntabel.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal (pemilik sumber daya) dan agen (pengelola sumber daya), di mana terdapat potensi konflik kepentingan akibat asimetri informasi dan perbedaan tujuan (Jensen & Meckling, 1976). Dalam pengelolaan BUMDes, masyarakat dan pemerintah desa sebagai prinsipal mempercayakan pengelolaan dana dan aset kepada pengurus BUMDes sebagai agen. Menurut Eisenhardt (1989), pengendalian internal yang efektif dapat mengurangi risiko moral hazard dan meningkatkan akuntabilitas agen kepada prinsipal. Penelitian Musah et al. (2022) menguatkan bahwa penerapan teori keagenan dalam sistem pengendalian internal dapat meningkatkan transparansi dan akurasi pelaporan keuangan di sektor UKM yang memiliki karakteristik mirip dengan BUMDes. Implementasi SAK-ETAP dalam Pelaporan Keuangan.

SAK-ETAP disusun untuk memudahkan entitas kecil dan menengah dalam menyusun laporan keuangan yang relevan, sederhana, dan dapat dipertanggungjawabkan (IAI, 2019). Implementasi SAK-ETAP pada BUMDes memungkinkan pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi namun dengan tingkat kompleksitas yang lebih rendah dibandingkan entitas besar. Menurut Wibowo (2020), kendala utama penerapan SAK-ETAP di BUMDes adalah keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya sistem informasi akuntansi yang memadai. Oleh karena itu, pelatihan dan penggunaan teknologi informasi sangat diperlukan untuk mendukung pelaporan keuangan yang akurat dan tepat waktu.

Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal (SPI) merupakan suatu proses yang dilakukan oleh seluruh anggota organisasi untuk memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan organisasi, termasuk efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (COSO, 2013). Menurut Hall (2017), SPI

terdiri atas lima komponen utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Implementasi SPI yang efektif sangat penting untuk menjaga akurasi dan keandalan laporan keuangan, khususnya dalam konteks Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berperan sebagai lembaga ekonomi desa.

Penelitian oleh Sukardiantoni et al. (2021) mengungkapkan bahwa penerapan SPI pada BUMDes belum sepenuhnya optimal, terutama pada aspek lingkungan pengendalian dan pengawasan. Hal ini berpengaruh pada potensi risiko kesalahan dalam pelaporan keuangan. Oleh karena itu, penguatan SPI melalui pelatihan SDM dan penggunaan teknologi informasi menjadi kunci dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan BUMDes.

Implementasi SAK-ETAP dalam Pelaporan Keuangan BUMDES

SAK-ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) disusun untuk memudahkan entitas kecil dan menengah dalam menyusun laporan keuangan yang relevan, sederhana, dan dapat dipertanggungjawabkan (IAI, 2019). Implementasi SAK-ETAP pada BUMDes memungkinkan pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi namun dengan tingkat kompleksitas yang lebih rendah dibandingkan entitas besar. Menurut Wibowo (2020), kendala utama penerapan SAK-ETAP di BUMDes adalah keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya sistem informasi akuntansi yang memadai. Oleh karena itu, pelatihan dan penggunaan teknologi informasi sangat diperlukan untuk mendukung pelaporan keuangan yang akurat dan tepat waktu.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah entitas usaha yang dibentuk oleh pemerintah desa dan dikelola oleh masyarakat untuk mengelola potensi ekonomi desa demi meningkatkan kesejahteraan warga desa. Keberadaan BUMDes diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menekankan pada kemandirian desa melalui penguatan ekonomi lokal. Menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT, 2018), BUMDes memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi desa, antara lain sebagai penyedia lapangan kerja, peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta penggerak sektor riil di pedesaan. Namun demikian, banyak BUMDes menghadapi tantangan dalam aspek tata kelola, transparansi keuangan, dan akuntabilitas. Penelitian yang dilakukan oleh Arifin & Sulastri (2021) menunjukkan bahwa implementasi SAK-ETAP dalam pelaporan keuangan BUMDes masih belum optimal karena rendahnya pemahaman pengelola terhadap prinsip-prinsip akuntansi dan kurangnya pelatihan akuntansi yang sistematis. Hambatan lainnya adalah belum tersedianya panduan teknis atau aplikasi berbasis SAK-ETAP yang disesuaikan dengan kebutuhan BUMDes.

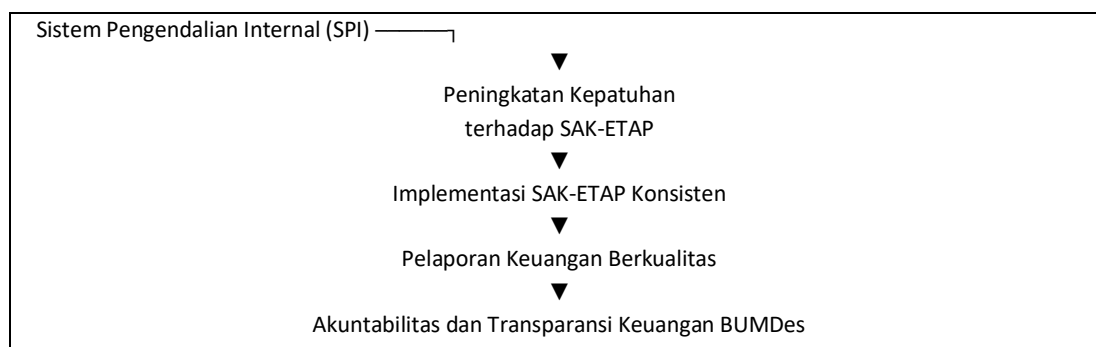
Wulandari dan Dewi (2020) menemukan bahwa BUMDes yang telah menerapkan SAK-ETAP dalam pelaporannya menunjukkan peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Laporan keuangan yang sesuai standar juga mempermudah pemerintah desa dalam proses monitoring dan evaluasi. Sementara itu, studi dari Prasetyo & Arumsari (2023) menyoroti pentingnya pendampingan dan pelatihan berkelanjutan bagi aparatur pengelola BUMDes agar implementasi SAK-ETAP tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar mendukung pengambilan keputusan ekonomi dan pengelolaan usaha yang efektif. Dengan demikian, penerapan SAK-ETAP

dalam pelaporan keuangan BUMDes tidak hanya menjadi kewajiban normatif, tetapi juga strategi penting untuk membangun tata kelola keuangan yang profesional dan akuntabel di tingkat desa.

Mardiasmo (2018) menegaskan bahwa kelemahan utama BUMDes terletak pada kurangnya sistem pelaporan keuangan yang baku dan lemahnya penerapan sistem pengendalian internal. Permasalahan ini diperparah oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, minimnya pelatihan akuntansi, serta rendahnya literasi keuangan aparatur desa. Penelitian oleh Siregar dan Nugroho (2021) menunjukkan bahwa sebagian besar BUMDes belum menyusun laporan keuangan secara sistematis dan sesuai standar akuntansi. Hal ini menyebabkan informasi keuangan yang dihasilkan tidak dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan yang andal, baik bagi pengelola, masyarakat, maupun pemerintah desa. Lebih lanjut, studi dari Wiranata & Rahayu (2023) menyatakan bahwa penguatan sistem akuntansi dan pengendalian internal di BUMDes akan berdampak positif terhadap peningkatan akuntabilitas dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, penerapan SAK-ETAP dan sistem pengendalian internal yang memadai menjadi penting dalam membangun tata kelola keuangan BUMDes yang baik

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal yang efektif dan penerapan SAK-ETAP merupakan faktor krusial dalam pelaporan keuangan BUMDes yang akuntabel. Teori keagenan memberikan landasan konseptual mengapa pengendalian internal diperlukan sebagai mekanisme pengawasan untuk mengurangi risiko penyimpangan oleh pengurus (agen) agar sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pemerintah desa (prinsipal).

Gambar 1 Kerangka Berfikir



Sumber: Olahan Peneliti, 2025

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada penggalian informasi secara mendalam terhadap satu objek tunggal, yaitu BUMDes Teja Pundi Kencana di Desa Cibuntu. Studi kasus memungkinkan peneliti memahami fenomena yang kompleks dalam konteks nyata, dengan memperhatikan dinamika dan faktor kontekstual yang melingkupi implementasi SPI dan SAK-ETAP dalam pelaporan keuangan.

Lokasi Penelitian di BUMDes Teja Pundi Kencana yang berlokasi di Desa Cibuntu Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Populasi dan Sampel bersifat terbuka dan bukan

statistik. Sampel ditentukan secara *purposive* yaitu dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terhadap objek penelitian. Informan kunci dalam penelitian ini antara lain: Direktur BUMDes, Bendahara BUMDes, Staf Keuangan, Perangkat Desa yang berkaitan dengan pengawasan keuangan. Jenis dan Sumber Data Primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif terhadap informan utama. Data Sekunder meliputi dokumen laporan keuangan, catatan internal, prosedur kebijakan keuangan, arsip transaksi serta peraturan yang berkaitan.

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi data untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas. Wawancara mendalam menggunakan panduan semi-terstruktur untuk menggali informasi tentang penerapan SPI dan SAK-ETAP. Observasi Partisipatif melibatkan kehadiran langsung peneliti dalam kegiatan penyusunan laporan keuangan dan proses internal. Studi Dokumentasi menganalisis dokumen laporan keuangan, kebijakan internal, dan arsip pendukung lainnya. Teknik Analisis Data mengikuti model interaktif Miles, Huberman & Saldana (2020) yang meliputi: Reduksi Data, penyajian data, penarikan kesimpulan untuk menyusun interpretasi akhir berdasarkan temuan yang dikaitkan dengan teori dan konteks lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Tabel 4.1 Hasil Penelitian Kualitatif pada BUMDes Teja Pundi Kencana

Komponen	Temuan Penelitian	Keterangan
Lingkungan Pengendalian	1. Nilai etika dan integritas dijalankan melalui teguran bertahap. 2. Penempatan jabatan lebih mengutamakan ketersediaan SDM <i>local</i> 3. Struktur organisasi belum lengkap dengan uraian tugas	Sudah diterapkan secara substansial namun belum terdokumentasi dan belum dilengkapi pelatihan rutin
Penilaian Risiko	1. Belum ada mekanisme formal untuk identifikasi dan mitigasi risiko- Risiko akuntansi dan keuangan belum dipetakan	Proses penilaian risiko belum terinternalisasi sesuai prinsip COSO
Aktivitas Pengendalian	1. Tidak ada pemisahan fungsi pencatat dan pemegang kas secara optimal. 2. Bukti transaksi belum terdokumentasi baik- Tidak ada otorisasi/verifikasi berlapis	Prosedur bersifat informal dan tidak terdokumentasi secara sistematis
Kegiatan Pemantauan	1. Monitoring dilakukan insidental dan tidak berkelanjutan. 2. Pemeriksaan hanya menjelang pelaporan tahunan- Tidak ada audit internal	Belum ada evaluasi sistematis terhadap sistem pengendalian internal
Implementasi SAK-ETAP	1. Pengelola belum memahami SAK-ETAP secara memadai. 2. Tidak tersedia pedoman teknis yang aplikatif ada inisiatif laporan dari bendahara.	Berpotensi diterapkan jika tersedia pelatihan dan supervisi teknis

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Pada tabel 4.1 menerangkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal berbasis kerangka COSO serta implementasi SAK-ETAP pada BUMDes Teja Pundi Kencana Desa Cibuntu. Hasil temuan lapangan disusun ke dalam lima aspek utama berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian telah menunjukkan penerapan nilai-nilai dasar seperti integritas dan etika kerja. Hal ini tercermin dari langkah pengurus dalam menanggapi pelanggaran melalui proses pembinaan secara bertahap. Pengelolaan jabatan di internal BUMDes juga memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia lokal, meskipun masih belum didukung oleh kompetensi formal yang optimal. Struktur organisasi sudah ada, namun belum lengkap dengan uraian tugas tertulis. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek lingkungan pengendalian telah berjalan secara substantif, tetapi belum sepenuhnya terdokumentasi dan diformalisasi sesuai standar.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko belum terdapat pendekatan sistematis untuk mengenali dan menganalisis potensi risiko yang bisa menghambat pencapaian tujuan BUMDes, khususnya dalam pengelolaan keuangan. Risiko-risiko seperti kesalahan pencatatan, penyalahgunaan dana, atau kehilangan data belum dipetakan dan ditangani secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa elemen penilaian risiko dalam kerangka COSO belum diinternalisasi dalam praktik pengelolaan BUMDes.

3. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian yang diterapkan masih bersifat informal. Tidak terdapat pemisahan tugas secara tegas antara pencatat transaksi dan pengelola kas, yang seharusnya menjadi bagian penting dalam mencegah kesalahan atau kecurangan. Prosedur persetujuan transaksi keuangan hanya dilakukan secara verbal dan tidak selalu disertai dengan dokumentasi lengkap. Standar dokumentasi, seperti bukti pembayaran atau nota, belum dijalankan dengan baik, sehingga berisiko menimbulkan ketidaktepatan laporan keuangan.

4. Kegiatan Pemantauan (*Monitoring*)

Kegiatan monitoring belum dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan. Evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian internal hanya dilakukan menjelang laporan tahunan dan lebih bersifat administratif. Tidak terdapat sistem audit internal maupun pengawasan periodik dari pihak independen. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan belum menyentuh aspek efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian itu sendiri, sebagaimana disarankan dalam teori COSO.

5. Implementasi SAK-ETAP

Hasil wawancara Implementasi SAK-ETAP menunjukkan bahwa pengelola belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai standar akuntansi tersebut. Tidak tersedia panduan teknis atau pelatihan formal yang mendukung proses pencatatan keuangan berbasis standar. Meski begitu, terdapat inisiatif dari bendahara BUMDes untuk menyusun laporan secara lebih terstruktur berdasarkan kebutuhan pertanggungjawaban kepada pemerintah desa. Ini menunjukkan bahwa penerapan SAK-ETAP memiliki peluang untuk dilaksanakan dengan lebih baik jika diberikan dukungan pelatihan dan supervisi dari instansi terkait.

Pembahasan

1. Sistem Pengendalian Internal

Penelitian ini mengungkapkan bahwa sistem pengendalian internal di BUMDes Teja Pundi Kencana, Desa Cibuntu, belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan kerangka *Committee of*

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Berdasarkan kerangka tersebut, lima elemen utama lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan masih menghadapi sejumlah kendala dalam implementasinya.

Secara substantif, lingkungan pengendalian sudah mencerminkan nilai-nilai etis dan struktur organisasi yang berbasis kekeluargaan dan kepercayaan sosial antar pengurus yang menjadi ciri khas tata kelola desa. Namun, nilai-nilai ini belum didukung oleh dokumentasi formal berupa kebijakan tertulis, prosedur baku, dan kode etik, sebagaimana disarankan dalam studi Indriani & Puspitasari (2021) yang menekankan pentingnya dokumentasi formal dalam pengendalian internal pada entitas skala kecil seperti BUMDes.

Penilaian risiko tidak dilakukan secara sistematis. Hal ini mencerminkan masih rendahnya kesadaran akan pentingnya manajemen risiko dalam menjaga kelangsungan operasi khususnya dalam menghadapi tantangan eksternal seperti perubahan kebijakan pemerintah desa dan fluktuasi pendapatan dari unit usaha. Temuan ini selaras dengan penelitian Mulyani et al. (2020) yang menunjukkan bahwa sebagian besar BUMDes di Indonesia belum memiliki sistem mitigasi risiko yang memadai karena keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Aktivitas pengendalian juga masih berlangsung secara informal seperti verifikasi manual oleh ketua atau bendahara tanpa adanya audit internal atau sistem kontrol silang. Prosedur pengendalian seperti otorisasi transaksi, pemisahan tugas, dan pencatatan ganda belum sepenuhnya diterapkan, memperbesar peluang terjadinya kecurangan (*fraud*) atau kesalahan akuntansi. Penelitian oleh Rahmawati & Nugroho (2019) mendukung temuan ini menyatakan bahwa lemahnya sistem kontrol di BUMDes menyebabkan laporan keuangan rentan terhadap manipulasi.

Informasi dan komunikasi, saluran pelaporan dan pertukaran informasi masih bersifat konvensional seperti melalui rapat desa dan pencatatan manual. Belum ada sistem informasi berbasis digital yang digunakan untuk mempercepat dan memperluas cakupan informasi keuangan yang tersedia bagi pemangku kepentingan. Padahal, menurut COSO dan Nurlaili & Sari (2022), sistem pengendalian internal yang efektif sangat dipengaruhi oleh kecepatan dan keakuratan informasi. Selanjutnya aktivitas pemantauan (*monitoring*) lebih difokuskan pada aspek administratif seperti ketersediaan bukti transaksi bukan pada pengukuran efektivitas sistem secara keseluruhan. Pemantauan substantif terhadap kepatuhan dan efisiensi operasional belum menjadi praktik yang lazim dilakukan.

Penguatan sistem pengendalian internal di BUMDes sangat relevan untuk mendukung keberlanjutan ekonomi dan lingkungan. Dengan tata kelola yang baik dan akuntabel, BUMDes dapat mengelola sumber daya desa secara lebih efisien dan bertanggung jawab sehingga mengurangi praktik eksploitasi sumber daya dan mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan. *Green Theory* menekankan bahwa sistem kelembagaan lokal yang akuntabel berkontribusi terhadap *green governance* dan keadilan ekologis, yang menjadi dasar keberlanjutan jangka panjang.

2. Implementasi SAK-ETAP

Laporan neraca BUMDes Teja Pundi Kencana menunjukkan kesesuaian dengan prinsip dasar SAK-ETAP, yaitu keseimbangan antara total aset dan kewajiban ditambah ekuitas. Format skontro

yang digunakan juga sesuai dengan praktik standar untuk entitas skala kecil dan menengah. Hal ini menandakan adanya pemahaman dasar mengenai pelaporan posisi keuangan. Namun demikian, keterbatasan pada klasifikasi akun yang kurang rinci dan tidak adanya pengungkapan tentang estimasi atau asumsi akuntansi menunjukkan bahwa pelaporan belum sepenuhnya memenuhi prinsip fair presentation seperti dijelaskan dalam Riset oleh Pramudito & Fitriani (2020) yang menggarisbawahi pentingnya pencatatan yang lebih akrual dan informatif untuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Berikut tabel neraca:

Tabel 4.2 Laporan Neraca

BUMDes Teja Pundi Kencana		
Neraca		
Periode 01 Jan-31 Des 2024		
HARTA		
Harta Lancar		
1-10001	Kas	(599.714.235,00)
1-10003	Bank Mandiri	12.918.750,00
1-10005	Bank Rakyat Indonesia (BRI)	1.622.556.600,00
1-10006	Bank BJB	131.625.000,00
1-10100	Piutang Usaha	10.912.500,00
Total Harta Lancar		1.178.298.615,00
Harta Tetap		
1-10704	Mesin dan Peralatan	12.542.400,00
Total Harta Tetap		12.542.400,00
TOTAL HARTA		1.190.841.015,00
KEWAJIBAN DAN MODAL		
Kewajiban		0,00
Total Kewajiban		0.00
Modal		
	Laba-rugi	1.105.841.015,00
3-30101	Modal awal	85.000.000,00
Total Modal		1.190.841.015,00
TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL		1.190.841.015,00

Sumber: BUMDes Teja Pundi Kencana, 2024

Laporan neraca yang disajikan menggambarkan posisi keuangan entitas dengan menampilkan rincian mengenai aset, kewajiban dan modal. Berikut ini merupakan analisis mendalam mengenai kesesuaian laporan neraca tersebut dengan ketentuan dalam SAK-ETAP. Laporan neraca menggunakan format skontro, yang bentuknya menyerupai huruf "T", dengan aset ditempatkan di sisi kiri, sementara kewajiban dan modal berada di sisi kanan. Penggunaan format ini sesuai dengan ketentuan dalam SAK-ETAP dan telah diakui dalam berbagai literatur akuntansi. Adapun rincian yang disajikan adalah sebagai berikut: Total aset sebesar Rp 1.190.841.015, total kewajiban dan modal sebesar Rp 1.190.841.015. Kondisi di mana total aset sama dengan jumlah kewajiban dan modal menunjukkan bahwa laporan neraca telah

Damayanti (2019) menyatakan bahwa pelaporan keuangan UMKM atau BUMDes yang tidak dilengkapi dengan rincian catatan menyebabkan keraguan pada validitas informasi tersebut oleh investor atau mitra usaha pada laporan keuangan seperti laba rugi. Berikut laporan laba rugi:

Laporan laba rugi yang disajikan pada tabel 4.3 tersebut, memperlihatkan kinerja keuangan entitas selama periode Januari hingga Desember 2024 yaitu pendapatan utama yang diperoleh entitas tercatat secara rinci, memberikan gambaran jelas tentang sumber-sumber pendapatan yang mendukung aktivitas operasional. Selain itu, beban-beban yang terkait dengan operasional

seperti biaya produksi, biaya administrasi dan beban usaha lainnya juga diuraikan untuk menunjukkan total pengeluaran yang dikeluarkan dalam periode yang sama. Selisih antara total pendapatan dan total beban menghasilkan laba bersih, yang merupakan indikator utama efektivitas manajemen dalam mengelola sumber daya dan operasional entitas. Laporan ini penting sebagai alat evaluasi kinerja keuangan serta dasar pengambilan keputusan oleh manajemen dan pemangku kepentingan lainnya. Tetapi, jika laporan laba rugi kurang menyajikan rincian beban atau tidak mencantumkan komponen penting seperti beban pajak, hal ini dapat mengurangi tingkat transparansi dan akurasi laporan keuangan. Oleh karena itu, catatan atas laporan keuangan dan pengungkapan tambahan sangat diperlukan untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan sesuai dengan standar akuntansi, seperti SAK-ETAP.

Laporan laba rugi ini telah memenuhi sebagian persyaratan SAK-ETAP dalam hal struktur dasar dan pengakuan pendapatan. Namun, ketiadaan beban pajak, kurangnya rincian beban lainnya, dan tidak adanya catatan atas laporan keuangan menjadikannya tidak lengkap menurut standar. Perbaikan pada tiga area utama pajak, pengungkapan dan klasifikasi beban diperlukan untuk mencapai kepatuhan penuh. Penyajian laporan keuangan yang sesuai SAK-ETAP tidak hanya memenuhi regulasi tetapi juga meningkatkan kredibilitas entitas di mata investor, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

Laporan perubahan modal telah menyajikan informasi yang tepat, dengan menampilkan saldo awal, laba bersih, dan saldo akhir. Hal ini menunjukkan bahwa BUMDes memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya pelacakan perubahan modal. Namun, tidak adanya informasi tentang distribusi laba atau kebijakan pembagian keuntungan ke masyarakat desa mencerminkan kurangnya transparansi distribusi manfaat ekonomi. Penelitian oleh Astuti & Raharjo (2021) menunjukkan bahwa akuntabilitas penggunaan laba menjadi salah satu indikator kunci keberhasilan BUMDes sebagai badan usaha milik publik. Berikut tabelnya:

Tabel 4.4 Laporan perubahan modal

BUMDes Teja Pundi Kencana Perubahan Modal Periode 2024		
Modal		
3-30101	Modal Awal	85.000.000,00
3-30000	Modal Saham	0,00
3-30001	Modal Tambahan	0,00
3-30100	Laba Ditahan	0,00
3-30200	Deviden	0,00
3-30300	Pendapatan Komprehensif Lainnya	0,00
3-30999	Saldo Awal	0,00
	Laba Bersih	1.105.841.015,00
	Total Modal	1.190.841.015,00
Total		1.190.841.015,00

Sumber: BUMDes Teja Pundi Kencana, 2024

Perusahaan memiliki modal sebesar Rp 85.000.000. Selama periode berjalan, perusahaan memperoleh laba bersih sebesar Rp 1.105.841.015. Tidak terdapat penambahan modal saham, modal tambahan, laba ditahan sebelumnya, pembagian dividen, maupun pendapatan komprehensif lainnya. Dengan demikian, seluruh laba bersih tahun berjalan langsung menambah modal perusahaan. Pada akhir periode, total modal perusahaan meningkat menjadi Rp 1.190.841.015. Penyajian ini sudah sesuai dengan ketentuan SAK-ETAP, karena menampilkan saldo modal awal, penambahan dari laba bersih, dan saldo modal akhir secara jelas dan terstruktur.

Penyajian arus kas telah memisahkan aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan sebagaimana disyaratkan dalam SAK-ETAP. Kemampuan menghasilkan arus kas bersih dari aktivitas operasi menunjukkan kinerja keuangan yang sehat. Tabel arus kas sebagai berikut:

Tabel 4.5 Laporan Arus Kas

BUMDes Teja Pundi Kencana Arus Kas Periode 01 Jan- 31 Des 2024		
Aktifitas Operasional		
	Penerimaan dari pelanggan	2.006.818.500,00
	Aset lancar lainnya	0,00
	Pembayaran ke pemasok	(22.392.750,00)
	Liabilitas jangka pendek lainnya	0,00
	Pendapatan lainnya	337.500,00
	Pengeluaran operasional	(1.495.317.084,00)
Total Aktifitas Operasional		489.446.166,00
Aktifitas Investasi		
	Perolehan/Penjualan aset	(11.417.400,00)
	Aktifitas Investasi Lainnya	0,00
Total Aktifitas Investasi		(11.417.400,00)
Aktifitas Keuangan		
	Pembayaran/Penerimaan Pinjaman	0,00
	Ekuitas/Modal	45.000.000,00
Total Aktifitas Keuangan		45.000.000,00
Perubahan Kas		523.028.766,00
Posisi Kas 31 Des 2023		874.134.133,00
Posisi Kas 31 Des 2024		1.397.162.899,00

Sumber: BUMDes Teja Pundi Kencana, 2024

Laporan arus kas ini menunjukkan bagaimana perusahaan mengelola kasnya melalui tiga aktivitas utama, yaitu aktivitas operasional, investasi, dan keuangan. Dari aktivitas operasional, perusahaan memperoleh kas terutama dari penerimaan pelanggan sebesar Rp 2.006.818.500 dan pendapatan lain-lain sebesar Rp 337.500. Setelah dikurangi pembayaran ke pemasok sebesar Rp

22.392.750 dan pengeluaran operasional sebesar Rp 1.495.317.084, perusahaan mencatat arus kas bersih dari aktivitas operasional sebesar Rp 489.446.166. Nilai ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan kas yang positif dari kegiatan usahanya sehari-hari.

Pada aktivitas investasi, terdapat arus kas keluar sebesar Rp 11.417.400 yang digunakan untuk perolehan atau penjualan aset tetap. Tidak terdapat aktivitas investasi lain selama periode ini, sehingga total arus kas bersih dari aktivitas investasi adalah negatif Rp 11.417.400. Dari aktivitas keuangan, perusahaan memperoleh tambahan modal (*equitas*) sebesar Rp 45.000.000. Tidak ada aktivitas penerimaan atau pembayaran pinjaman yang dilaporkan pada periode ini. Secara keseluruhan, terjadi kenaikan kas bersih selama periode sebesar Rp 523.028.766. Dengan saldo kas awal per 31 Desember 2023 sebesar Rp 874.134.133, maka saldo kas akhir perusahaan per 31 Desember 2024 menjadi Rp 1.397.162.899.

Penyusunan laporan arus kas ini telah sesuai dengan SAK-ETAP karena sudah memisahkan arus kas berdasarkan aktivitas operasional, investasi, dan keuangan, serta menyajikan saldo kas awal dan akhir dengan jelas. Laporan ini memberikan informasi yang penting bagi pemakai laporan keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas, melakukan investasi, serta memperoleh dana dari pemilik atau pihak lain.

Catatan atas Laporan Keuangan tidak tersusun merupakan kelemahan mendasar yang menghambat pemahaman menyeluruh atas posisi keuangan dan kinerja BUMDes. Padahal, catatan ini sangat krusial dalam menjelaskan kebijakan akuntansi, penilaian aset serta komitmen keuangan yang bersifat kontinjensi. Studi oleh Sari & Wibowo (2020) menekankan bahwa catatan atas laporan keuangan adalah jantung transparansi dalam pelaporan akuntansi terutama untuk entitas yang dikelola secara kolektif seperti BUMDes. Tanpa komponen ini, informasi yang diberikan tidak dapat diinterpretasikan secara tepat oleh pihak luar.

KESIMPULAN

Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang ada belum berjalan secara optimal, terutama dalam aspek lingkungan pengendalian dan proses pemantauan. Hal ini disebabkan oleh belum adanya kebijakan tertulis yang formal dan kurangnya evaluasi berkala terhadap kegiatan keuangan. Pelaksanaan SAK-ETAP dalam penyusunan laporan keuangan masih belum maksimal. Beberapa komponen penting seperti catatan atas laporan keuangan belum disusun, yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan sumber daya manusia dan kurangnya pelatihan teknis yang memadai. Kualitas laporan keuangan BUMDes belum sepenuhnya memenuhi kriteria relevansi, keandalan, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi karena pencatatan dan dokumentasi transaksi keuangan yang belum sistematis dan konsisten. Faktor utama yang menghambat implementasi adalah rendahnya kompetensi sumber daya manusia, keterbatasan fasilitas teknologi informasi serta tidak tersedianya pedoman pengelolaan keuangan yang baku. Namun, komitmen yang kuat dari pemerintah desa dan pengelola BUMDes menjadi potensi positif yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Sinergi yang efektif antara penerapan SPI dan pelaksanaan SAK-ETAP sangat diperlukan guna menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, didukung oleh kebijakan internal yang jelas serta pemanfaatan teknologi informasi yang tepat.

REFERENSI

- Astuti, Y., & Raharjo, K. (2021). Akuntabilitas penggunaan laba sebagai indikator keberhasilan BUMDes. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 16(2), 123–135.
- Atmadja, A. T., Putra, I. M. A., & Saraswati, E. (2023). Pengaruh kapasitas SDM dan pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes. *Jurnal Akuntansi Desa*, 9(2), 101–112.
- Arifin, M., & Sulastri, I. (2021). Implementasi SAK-ETAP dalam pelaporan keuangan BUMDes: Studi kasus di Kabupaten Sleman. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 8(2), 112–123.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). (2020). *Enterprise risk management: Integrating with strategy and performance*.
- Damayanti, R. (2019). Transparansi laporan keuangan UMKM: Tantangan dan solusi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(5), 1–14.
- Hall, J. A. (2017). *Accounting Information Systems* (9th ed.). Cengage Learning.
- IAI. (2019). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- IAI. (2020). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)* edisi terbaru. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ida Ayu, N. M., & Atmadja, A. T. (2023). Peran pemerintah daerah dalam peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDes. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan Desa*, 7(1), 55–65.
- Indriani, F., & Puspitasari, D. (2021). Peran dokumentasi formal dalam sistem pengendalian internal pada entitas skala kecil. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 10(1), 45–56.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kemendesa PDTT. (2023). *Laporan evaluasi kinerja BUMDes tahun 2023*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2018). *Pedoman umum pengelolaan BUMDes*. Jakarta: Kemendesa PDTT.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mulyani, S., Firmansyah, A., & Rahmadani, N. (2020). Mitigasi risiko dalam tata kelola BUMDes: Studi empiris di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(3), 201–217.
- Musah, A., Yusif, M., & Abor, J. Y. (2022). Internal control, agency theory and SME financial reporting quality: Evidence from Ghana. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 12(3), 404–421. <https://doi.org/10.1108/JAEE-02-2021-0054>
- Nurlaili, R., & Sari, A. (2022). Pentingnya kecepatan informasi dalam sistem pengendalian internal BUMDes. *Jurnal Sistem Informasi dan Akuntansi Publik*, 5(2), 89–102.
- Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2021 tentang Pendataan, Peningkatan, dan Pembinaan Badan Usaha Milik Desa.
- Prabowo, H., & Kurniawan, T. (2021). Analisis kontrol internal dalam pengelolaan keuangan BUMDes. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 22(1), 85–95.
- Prabowo, H., & Kurniawan, T. (2023). Pengaruh sistem pengendalian internal dan pelatihan terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 10(1), 55–68.



- Pramudito, A., & Fitriani, R. (2020). Penerapan SAK-ETAP dalam pelaporan keuangan BUMDes: Antara teori dan praktik. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 12(4), 305–318.
- Prasetyo, D., & Arumsari, D. (2023). Dampak pendampingan terhadap keberhasilan implementasi SAK-ETAP pada BUMDes. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 12(1), 20–31.
- Rahmawati, I., & Nugroho, D. (2019). Lemahnya sistem kontrol dan dampaknya terhadap manipulasi laporan keuangan di BUMDes. *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik*, 8(2), 110–124.
- Sari, M. N., & Pratama, R. (2021). Implementasi SAK-ETAP dalam mendukung transparansi laporan keuangan BUMDes. *Jurnal Akuntansi Desa*, 5(1), 25–34.
- Sari, M., & Wibowo, D. (2020). Catatan atas laporan keuangan sebagai jantung transparansi akuntansi BUMDes. *Jurnal Akuntansi Publik*, 6(3), 188–199.
- Savitri, D. (2024). Sinergi sistem pengendalian internal dan penerapan SAK-ETAP dalam pelaporan keuangan BUMDes. *Jurnal Tata Kelola Keuangan Desa*, 6(1), 45–58.
- Siregar, R., & Nugroho, A. (2021). Evaluasi sistem pelaporan keuangan pada BUMDes di Kabupaten Brebes. *Jurnal Keuangan dan Akuntansi Publik*, 9(2), 100–111.
- Sukardiantoni, S., Wulandari, A., & Rachmawati, Y. (2021). Analisis penerapan sistem pengendalian internal pada BUMDes: Studi pada BUMDes Mitra Usaha. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia*, 10(1), 45–56.
- Sukarmayasa, I. G. N., & Atmadja, A. T. (2024). Efektivitas sistem pengendalian internal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan BUMDes. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 15(1), 22–34.
- Sulistiyowati, R., Nugroho, A., & Rahayu, T. (2024). Penerapan kerangka COSO dalam sistem pengendalian internal BUMDes. *Jurnal Sistem Informasi dan Akuntansi*, 10(1), 12–24.
- Sulistiyowati, R., Nugroho, A., & Rahayu, T. (2024). Penerapan teknologi informasi dalam mendukung SPI dan SAK-ETAP pada BUMDes. *Jurnal Sistem Informasi dan Akuntansi Desa*, 7(1), 11–23.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wibowo, A. (2020). Kendala implementasi SAK-ETAP pada BUMDes di Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(2), 76–84.
- Wiranata, A., & Rahayu, S. (2023). Peran sistem akuntansi dalam peningkatan akuntabilitas keuangan BUMDes. *Jurnal Tata Kelola Desa*, 4(1), 35–46.
- Wulandari, S., & Dewi, M. (2020). Dampak penerapan SAK-ETAP terhadap akuntabilitas keuangan BUMDes. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Desa*, 6(2), 44–55.